



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Januari 2023

Nomor : 800.1.4/531/BPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : *Update* Jadwal Pengembangan
Kompetensi SDM Aparatur
Tahun 2023.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota

di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan amanat pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi seluruh ASN pada minimal 20 (dua puluh) Jam Pelajaran per tahun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit kerja Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

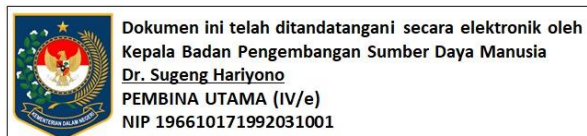
1. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.2.2.1/10683/BPSDM Tanggal 17 November 2022 tentang Jadwal Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Tahun 2023, Pada Tahun 2023 unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri berencana melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme APBN Rupiah Murni dan mekanisme kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi lingkup BPSDM Kemendagri, PPSDM Regional Makassar, Bukittinggi, Bandung, dan Yogyakarta serta Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu pada penjadwalan kegiatan sebagaimana terlampir. Adapun persyaratan peserta dan nominal kontribusi untuk kegiatan pengembangan kompetensi melalui mekanisme PNBP diberikan terlampir;

3. Ketentuan Umum pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Kantor Pusat BPSDM Kemendagri di Jakarta, ketentuan pendaftaran peserta diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Usulan nama-nama calon peserta sebagaimana ketentuan poin 2, disampaikan kepada masing-masing penyelenggara selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan diklat;
 - 2) Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi dengan alamat [url https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id](https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id).
 - 3) Pemanggilan peserta akan dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan diklat melalui surat pemanggilan peserta;
 - 4) Pada kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber dana Rupiah Murni, biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama mengikuti kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, sedangkan biaya transportasi dan uang saku peserta ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Pengirim;
 - 5) Pada kegiatan kontribusi PNBPN, para peserta diwajibkan *mentransfer* biaya penyelenggaraan diklat sebelum pelaksanaan kegiatan terlaksana. Biaya penyelenggaraan diklat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Biaya tersebut disetorkan melalui rekening *Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah melakukan pendaftaran diri kepada panitia. Biaya kontribusi tersebut hanya mencakup biaya penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, sedangkan biaya akomodasi dan konsumsi (biaya paket *fullboard*) serta transportasi dan uang saku para peserta yang mengikuti ditanggung oleh APBD pemerintah daerah selaku instansi pengirim.
 - b. Untuk kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di luar Jakarta, ketentuan pendaftaran peserta diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran peserta/usulan peserta dapat langsung dilakukan dengan menghubungi Person In Charge (PIC) masing-masing penyelenggara pengembangan kompetensi sebagaimana tertera dalam lampiran jadwal kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan;
 - 2) Para penyelenggara akan menyampaikan surat pemanggilan peserta yang telah melakukan pendaftaran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan;
 - 3) Pada kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber dana Rupiah Murni, biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama mengikuti kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, sedangkan biaya transportasi dan uang saku peserta ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Pengirim;

- 4) Pada kegiatan kontribusi PNBP, para peserta diwajibkan *mentransfer* biaya penyelenggaraan diklat sebelum pelaksanaan kegiatan terlaksana. Biaya penyelenggaraan diklat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri kepada Bendahara Penerima masing-masing Penyelenggara. Biaya tersebut disetorkan melalui rekening yang akan diberikan pada saat peserta telah melakukan pendaftaran diri kepada panitia. Biaya kontribusi tersebut hanya mencakup biaya penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, sedangkan biaya akomodasi dan konsumsi (biaya paket fullboard) serta transportasi dan uang saku para peserta yang mengikuti ditanggung oleh APBD pemerintah daerah selaku instansi pengirim.
4. Informasi yang lebih detail terkait tata tertib/ketentuan saat penyelenggaraan kegiatan diklat akan disampaikan melalui surat pemanggilan peserta oleh para penyelenggara. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q masing-masing pusat penyelenggara pengembangan kompetensi yang tercantum pada lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kemendagri;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kemendagri;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kemendagri; dan
5. Para Kepala BPSDM atau sebutan lainnya pada masing-masing Kementerian/Lembaga pembina teknis urusan pemerintahan konkuren.



**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
 BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
I Pusat Standarisasi dan Sertifikasi							
1	Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan	13 Maret 2023 s.d 18 Maret 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal	Contact person : Oktin (081383293582) Wasti (081213549388) Contact Person : Dr. Abner Sarlis Tindi, S.Sos., M.A (0895360040777) Kamti Sulistyowati (081280252510)	PNBP	Rp3.225.000,00 rincian: Biaya Diklat Rp2.650.000,00; uji kompetensi Rp500.000,00 dan sertifikat Uji Kompetensi Rp75.000,00.
2	Diklat pengelola LSP-PDN	22 Mei 2023 s.d 26 Mei 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
3	Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan Daerah Otonomi Baru	8 Mei 2023 s.d 13 Mei 2023	Jayapura, Provinsi papua	Klasikal		RM	-
4	Afirmasi Asesor Kompetensi Pemerintahan	1 Februari 2023 s.d 3 Februari 2023	-	Online (daring)		RM	-
5	Diklat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Bagi Daerah Otonomi Baru secara Virtual	30 Januari 2023 s.d 3 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Online (daring)		RM	-
6	Diklat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Bagi Daerah Otonomi Baru secara Virtual Angkatan II	6 Maret 2023 s.d 10 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Online (daring)		RM	-
7	Diklat Hypermedia Lanjutan	13 Maret 2023 s.d 17 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
8	Diklat Augmented Reality (AR) dalam mendukung kompetensi ASN	22 Mei 2023 s.d 26 Mei 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
II Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri							
1	Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (2 Angkatan - 60 orang)	8 Mei 2023 s.d 13 Mei 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal	Contact person: Telp/Fax : (021) 7981403 dan (021)79197770 Andika Dwi Eranggani (08114128848)	PNBP	Rp2.650.000,00
2	Diklat Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Daerah (2 AKT - 60 Orang)	22 Mei 2023 s.d 27 Mei 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
3	Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah (10 AKT - 300 Org)	I. 6 Maret 2023 s.d 11 Maret 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
		II. 10 Juli 2023 s.d 15 Juli 2023				PNBP	Rp2.650.000,00
		III. 21 Agustus 2023 s.d 26 Agustus 2023 (5 Hari)				PNBP	Rp2.650.000,00
4	Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (2 Angkatan - 60 orang)	20 November 2023 s.d 25 November 2023	Hotel (Jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
5	Diklat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2 AKT - 60 Orang)	13 Maret 2023 s.d 18 Maret 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
6	Diklat Penguatan Tugas-tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2 AKT - 60 Orang)	I. 24 Juli 2023 s.d 27 Juli 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.050.000,00
		II. 4 September 2023 s.d 7 September 2023					
7	Diklat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) (2 AKT - 60 Orang)	7 Agustus 2023 s.d 12 Agustus 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal	PNBP	Rp2.650.000,00	
8	Diklat inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Rangka Pelayanan Publik (2 AKT - 60 Org)	18 September 2023 s.d 23 September 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal	PNBP	Rp2.650.000,00	

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
9	Seminar Mewujudkan Desa Cerdas Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 (1 AKT - 90 Org)	9 Februari 2023 s.d 10 Februari 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		RM	-
10	Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik (1 AKT - 30 Org)	20 Februari 2023 s.d 25 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
11	Diklat Manajemen Pemerintahan Desa (6 AKT - 180 Org)	I. 5 Juni 2023 s.d 10 Juni 2023 II. 19 Juni 2023 s.d 24 Juni 2023 III. 9 Oktober 2023 s.d 14 Oktober 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
12	Diklat pengelolaan Desa Cerdas (4 AKT - 120 Org)	I. 23 Oktober 2023 s.d 28 Oktober 2023 II. 6 November 2023 s.d 11 November 2023	Hotel (jakarta)	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
13	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah (2 AKT - 60 Org)	13 Februari 2023 s.d. 17 Februari 2023	Hotel Jakarta	Klasikal	<i>Contact Person :</i> Putri (081288389964) Intan (081283075617)	PNBP	Rp2.500.000,00
14	Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Akt. I dan II (2 AKT - 60 Org)	27 Februari 2023 s.d. 3 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
15	Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah (2 AKT - 60 Org)	13 Maret 2023 s.d.17 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
16	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah (2 AKT - 60 Org)	8 Mei 2023 s.d. 12 Mei 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
17	Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Akt. III dan IV (2 AKT - 60 Org)	22 Mei 2023 s.d. 26 Mei 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
18	Diklat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (2 AKT - 60 Org)	5 Juni 2023 s.d. 9 Juni 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
19	Diklat Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2 AKT - 60 Org)	19 Juni 2023 s.d. 23 Juni 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
20	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah (2 AKT - 60 Org)	10 Juli 2023 s.d. 14 Juli 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
21	Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Akt. V dan VI (2 AKT - 60 Org)	7 Agustus s.d. 11 Agustus 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.500.000,00
22	Bimtek Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Angkatan I (1 AKT - 30 Org)	27 Maret 2023 s.d. 29 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
23	Bimtek Tata Cara Pengisian Form Lampiran B Pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (1 AKT - 30 Org)	27 Maret 2023 s.d. 29 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
24	Bimtek Penyusunan Rencana Aksi SPM (1 AKT - 30 Org)	3 April 2023 s.d. 5 April 2022	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
25	Bimtek Penerapan SPM dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (1 AKT - 30 Org)	10 April 2023 s.d. 12 April 2022	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
26	Bimtek Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Angkatan II (1 AKT - 30 Org)	10 April 2023 s.d. 12 April 2022	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
27	Workshop Penerapan Standar Pelayanan Minimal (online/daring) (9 AKT - 270 Org)	26 Juli 2023 s.d. 27 Juli 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
28	Diklat bagi Staf Ahli Kepala Daerah (3 AKT - 90 orang)	27 Februari 2023 s.d 3 Maret 2023 (pembelajaran Daring)	BPSDM Kemendagri	Daring	<i>Contact Person :</i> Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Telp/Fax.: 021-7943421 Mantha Uli (08128628574)	RM	-
		6 Maret 2023 - 10 Maret 2023 (pembelajaran Luring)	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
29	Diklat bagi Sekretaris Daerah (3 AKT - 30 orang)	20 Maret 2023 s.d 22 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal	Nabila Nisrina (081908812205)	RM	-
30	Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi PJ Kepala Daerah Tahun 2022 (101 Org)	4 April 2023 s.d 5 April 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		Asih Pujiati (081298104289)	RM
31	Diklat Fasilitasi Manajemen Reses DPRD bagi Pejabat Sekretariat DPRD (2AKT - 60 orang)	13 Maret 2023 -17 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.050.000,00
32	Diklat Fasilitasi Penyusunan Pokok Pikiran DPRD Berbasis Elektronik bagi Sekretariat DPRD (3 AKT - 90 orang)	13 Februari 2023-17 Februari 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.050.000,00
33	Diklat Fasilitasi Fungsi Pembentukan Perda DPRD bagi Sekretariat DPRD (1 AKT - 30 orang)	13Maret 2023 -17 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.050.000,00
34	Diklat Fasilitasi Fungsi Anggaran DPRD bagi Sekretariat DPRD (2 AKT - 60 orang)	12 Juni 2023 -16 Juni 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.050.000,00
35	Dilat Pejabat Strategis bagian Tata Pemerintahan (2 AKT - 60 orang)	3 Juli 2023 -7 Juli 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.050.000,00
III Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan							
1	Seminar Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan antar Negara (Online I)	2 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Daring (Online)	<i>Contact Person :</i> Melly Novita (082125001877)	RM	-
2	Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat Akt I dan II	20 s.d 25 Februari 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
3	Seminar Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan antar Negara (Online II)	2 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Daring (Online)		RM	-
4	Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat (2 AKT - 60 Org)	6 s.d.11 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
5	Bimtek Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan antar Negara (Klasikal)	8 s.d. 10 Mei 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		RM	-
6	Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat (2 AKT - 60 Org)	22 s.d. 27 Mei 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
7	Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat (2 AKT - 60 Org)	12 s.d 17 Juni 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
8	Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat (2 AKT - 60 Org)	10 s.d. 15 Juli 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
9	Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat (2 AKT - 60 Org)	4 s.d. 8 September 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
10	Diklat Laporan Kinerja dilingkungan Kementerian Dalam Negeri	6 s.d. 10 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal	<i>Contact Person : Nadya Paramitha, S.Psi. (081315895200)</i>	RM	-
11	Webinar Inovasi Daerah	14 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	daring (Online)		RM	-
12	Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah (Blended) Ak.I	Online: 05 s.d. 9 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	daring (Online)		RM	-
13		Onclass: 14 s.d. 16 Maret 2023		Klasikal			
14	Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah (Blended) Ak.II	Online: 05 s.d. 9 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	daring (Online)		RM	-
		Onclass: 14 s.d. 16 Maret 2023		Klasikal			
15	Diklat Analisis Jabatan Angkatan I dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 22 s.d 26 Mei 2023	Hotel	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
16	Diklat Analisis Jabatan Angkatan II dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 22 s.d 26 Mei 2023	Hotel	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
17	Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah (Blended) Ak. III	Online: 7 s.d. 8 Juni 2023	BPSDM Kemendagri	daring (Online)		RM	-
		Onclass: 13 s.d. 15 Juni 2023		Klasikal			
18	Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah (Blended) Ak. IV	Online: 7 s.d. 8 Juni 2023	BPSDM Kemendagri	daring (Online)		RM	-
		Onclass: 13 s.d. 15 Juni 2023		Klasikal			
19	Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan I dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 3 s.d 7 Juli 2023	Hotel	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
20	Diklat Manajemen Kepegawaian Angkatan I dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 3 s.d 7 Juli 2023	Hotel	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
21	Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 11 s.d 15 September 2023	Hotel	Klasikal	PNBP	Rp2.650.000,00	
22	Diklat Laporan Kinerja Angkatan I dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 11 s.d 15 September 2023	Hotel	Klasikal	PNBP	Rp2.650.000,00	
23	Diklat Manajemen Kepegawaian Angkatan II dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 13 s.d 17 November 2023	Hotel	Klasikal	PNBP	Rp2.650.000,00	
24	Diklat Laporan Kinerja Angkatan II dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Onclass: 13 s.d 17 November 2023	Hotel	Klasikal	PNBP	Rp2.650.000,00	
IV	Pusat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Teknis						
1	Diklat Legal Drafting Angkatan I	30 Januari 2023 s.d 3 Februari	BPSDM Kemendagri	Klasikal	<i>Contact Person: Rizki Setiani (081287177796)</i>	RM	-
2	Diklat Legal Drafting Angkatan II	13 Februari 2023 s.d 17 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
3	Diklat Legal Drafting Angkatan III	6 Maret 2023 s.d 10 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
4	Diklat Legal Drafting Angkatan IV	13 Maret 2023 s.d 17 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
5	Diklat Teknis bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Angkatan I	27 Februari 2023 s.d 3 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
6	Diklat Penguatan Kapasitas Bagi pejabat Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Kemendagri dan DKPP Angkatan I dan II (2 AKT - 60 Org)	20 Februari 2023 s.d 9 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
7	Diklat Manajemen ASN Angkatan I	27 Februari 2023 s.d 3 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
8	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda	8 Februari 2023 s.d 2 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal	<i>Contact Person:</i> Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Telp/fax : 021-7982659 021-7943419 Sri Yulita (08129921498) email : jfk.bpsdm2015@g	RM	-
9	Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Madya	8 Februari 2023 s.d 25 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
10	Pelatihan penjenjangan PPUPD Ahli Madya	15 Februari 2023 s.d 4 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp.6.725.000,00 rincian: Biaya Diklat Rp6.150.000,00; dan uji kompetensi Rp.575.000,00
11	Diklat Reviu RKA-PD Angkatan I, II, dan III. (3 AKT - 90 org)	6 Maret 2023 s.d 10 Maret 2023	Hotel Jakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
12	Diklat Teknis Pol PP dalam Mendukung Pilkada Pilkada Serentak 2024 (60 jp)	13 Februari 2023 s.d 17 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal	<i>Contact Person :</i> Rinasari (081293776175)	RM	-
13	Diklat Teknis Pol PP dalam Mendukung Pilkada Pilkada Serentak 2024 (30 jp)	8 Maret 2023 s.d 10 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
14	Diklat Teknis Pol PP dalam Mendukung Pilkada Pilkada Serentak 2024 (50 Jp)	13 Maret s.d 17 Maret 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
15	Diklat Fungsional Jenjang Muda Bagi Pol PP	13 Februari 2023 s.d 25 Februari 2023	BPSDM Kemendagri	Klasikal		RM	-
V	PPSDM Kemendagri Regional Bandung						
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	13 Maret s.d. 27 Juli 2023	PPSDM Regional Bandung	Blended Learning	<i>Contact Person:</i> Neta Siti Mutiawati, S.Sos., M.A.P (08156107683)	PNBP	Rp17.000.000,00
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II	03 April s.d. 16 Agustus 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Blended Learning		PNBP	Rp17.000.000,00
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III	5 Juni s.d. 27 September 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Blended Learning		PNBP	Rp17.000.000,00
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV	10 Juli 2023 s.d. 08 Nopember 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Blended Learning		PNBP	Rp17.000.000,00
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I	14 Maret s.d. 28 Juli 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Blended Learning		PNBP	Rp14.643.000,00
6	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II	4 April s.d. 18 Agustus 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Blended Learning		PNBP	Rp14.643.000,00
7	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III	6 Juni s.d. 29 September 2023	PPSDM Regional Bandung	Blended Learning		PNBP	Rp14.643.000,00
8	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV	11 Juli s.d. 09 Nopember 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Blended Learning		PNBP	Rp14.643.000,00
9	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Pengawas di Daerah Lingkup Regional	6 s.d. 10 Maret 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Klasikal		RM	-
10	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Administrator di Daerah Lingkup Regional	13 - 17 Maret 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Klasikal		RM	-
11	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Lingkup Regional Angkatan I	27 - 31 Maret 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Daring		RM	-
12	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Lingkup Regional Angkatan 2	3 - 7 April 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Daring		RM	-
13	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Lingkup Regional Angkatan 3	10 - 14 April 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Daring		RM	-

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
14	Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda	1 Februari 2023 s.d. 25 Februari	Luar Kantor	Blended Learning	<i>Copntact Person :</i> Nusirman, SE, M.AP (085624655777)	PNBP	Rp7.975.000,00
15	Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Pertama Angkatan I	13 Februari 2023 s.d. 9 Maret 2023	Luar Kantor	Klasikal		PNBP	Rp7.700.000,00
16	Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Pertama Angkatan II	13 Februari 2023 s.d. 9 Maret 2023	Luar Kantor	Klasikal		PNBP	Rp7.700.000,00
17	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Madya	2 Maret 2023 s.d. 11 Maret 2023	Luar Kantor	<i>Blended Learning</i>		PNBP	Rp3.950.000,00
18	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Muda	9 Maret 2023 s.d. 18 Maret 2023	Luar Kantor	<i>Blended Learning</i>		PNBP	Rp3.950.000,00
19	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda	24 Februari 2023 s.d. 25 Februari 2023	Luar Kantor	Klasikal		PNBP	Rp575.000,00
20	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Mei 2023 s.d. 13 Mei 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Klasikal	<i>Contact Person :</i> Ranti Sofiantini, S.Si, M.AP (08112121485)	PNBP	Rp3.150.000,00
21	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	6 Maret 2023 s.d. 11 Maret 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Klasikal		PNBP	Rp3.150.000,00
22	Diklat Substantif Peningkatan Kapasitas Lurah	19 Juni 2023 s.d. 23 Juni 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Klasikal		PNBP	Rp3.025.000,00
23	Diklat Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PPUPD	13 Maret 2023 s.d. 17 Maret 2023	Luar Kantor	Klasikal		PNBP	Rp2.650.000,00
24	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	22 Mei 2023 s.d. 26 Mei 2023	PPSDM Regional Bandung (Jatinangor)	Klasikal		RM	-
25	Latsar CPNS Golongan III dan II	Mei s.d. Juli 2023	PPSDM Regional Bandung	<i>Blended Learning</i>		PNBP	Rp5.260.000,00
VI PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta							
1	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur	6 s.d. 11 Maret 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	online/daring	<i>Contact Person :</i> Aji Bawanto, S.Sos, M.Si (HP. 081390252372) dan Elvira Erossanty Pane, SE (HP. 089694670089)	RM	-
2	Pelatihan Teknis Manajemen Kinerja Pegawai Berdasarkan PermenPAN Nomor 6 dan 7 Tahun 2022	27 s.d 30 Maret 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	online/daring		RM	-
3	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Muda (dari Inpassing)	4 s.d. 15 Mei 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	<i>Blended learning</i>		PNBP	RP4.700.000,00
4	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional PPUPD	29 mei s.d. 2 Juni 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Klasikal		PNBP	Rp3.025.000,-
5	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Pertama (dari Inpassing)	8 s.d. 19 Juni 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	<i>Blended learning</i>		PNBP	Rp4.700.000,-
6	Pelatihan Penyusunan Kebijakan Analis Kebijakan	3 s.d. 6 Juli 2022	PPSDM Regional Yogyakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.560.000,-
7	Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan SPM (RM)	Gel I : 27 Februari s.d 3 Maret 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Klasikal	<i>Contact Person:</i> Drs. Sakroni (Hp. 081578727395)	RM	-
8		Gel II : 13 Maret s.d 17 Maret 2023					
9		Gel III : 8 Mei s.d 12 Mei 2023					
10	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Gel I : Mei s.d Juli 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	<i>Blended Learning</i>		PNBP	Rp5.260.000,00
		Gel II : Juni s.d Agustus 2023					
11	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	Gel I : Mei s.d Juli 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	<i>Blended Learning</i>		PNBP	Rp5.260.000,00
		Gel II : Juni s.d Agustus 2023					

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
12	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Akt I : 18 Maret s.d. 22 Juli 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Blended Learning	Contact Person: Drs. Mirza Erapunagi (Hp. 0811256217)	PNBP	Rp14.643.000,00
		Akt II : 30 Mei s.d. 20 September 2023					
13	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah	28 s.d. 30 Maret 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.275.000,-
14	Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26 s.d. 28 April 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Klasikal		PNBP	Rp2.275.000,-
15	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Akt I : 20 Maret s.d. 26 Juli 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Blended Learning	Contact Person: Dra. Eny Setyawati, MT (HP. 08122984409)	PNBP	Rp17.000.000,00
		Akt II : 4 Mei s.d. 30 Agustus 2023					
16	Orientasi RPJMD dan Evaluasi Renstra Organisasi Perangkat Daerah	8 s.d. 10 Maret 2023	tel Royal Malioboro	Klasikal	Contact Person: Nines Octaviani Permata Sari, SE, M.Si (Hp. 081392252208)	PNBP	Rp2.050.000,-
17	Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Akt I : 8 s.d. 12 Mei 2023	PPSDM Regional Yogyakarta	Klasikal	Contact Person: Ardiyanto Nugroho, ST, MM (HP. 08122984409)	PNBP	Rp3.025.000,-
		Akt II : 24 s.d. 28 Juli 2023					
VIII PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi							
1	TOT Pengembangan Kompetensi Substansi Kemendagri (Hybrid Method) angkatan 1	24 Juli 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal	Contact Person: Aryo Fernandes,S.Si, M.M (085228135759)	RM	-
2	TOT Pengembangan Kompetensi Substansi Kemendagri (Hybrid Method) angkatan 2	7 Agustus 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		RM	-
3	Pelatihan Teknis SAKIP	24 Juli 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		PNBP	Rp3.025.000,00
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator akt 1	21 Maret 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp17.000.000,00
5	Pelatihan Kepemimpinan Administrator akt 2	11 April 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp17.000.000,00
6	Pelatihan Kepemimpinan Administrator akt 3	16 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp17.000.000,00
7	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	27 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp14.643.000,00
8	Latsar Angkatan 1	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
9	Latsar Angkatan 2	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
10	Latsar Angkatan 3	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
11	Latsar Angkatan 4	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
12	Latsar Angkatan 5	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
13	Latsar Angkatan 6	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
14	Latsar Angkatan 7	8 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00
15	Latsar Angkatan 8	8 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Learning		PNBP	Rp5.260.000,00

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang	
16	Latsar Angkatan 9	8 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
17	Latsar Angkatan 10	8 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
18	Latsar Angkatan 11	8 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
19	Latsar Angkatan 12	8 Mei 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
20	Latsar Angkatan 13	19 Juni 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
21	Latsar Angkatan 14	19 Juni 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
22	Latsar Angkatan 15	19 Juni 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
24	Latsar Angkatan 16	19 Juni 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Blended Laerning		PNBP	Rp5.260.000,00	
25	Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara OPD	19 Juni 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		PNBP	Rp2.875.000,00	
26	Pelatihan Teknis Pengelolaan Tata Naskah Dinas OPD	21 Agustus 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		PNBP	Rp2.875.000,00	
27	Pelatihan Teknis Standar Pelayanan Publik	3 Juli 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		PNBP	Rp3.025.000,00	
28	SPM Angkatan 1	13 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		RM	-	
29	SPM Angkatan 2	13 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		RM	-	
30	SPM Angkatan 3	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		RM	-	
31	SPM Angkatan 4	20 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		RM	-	
32	SPM Angkatan 5	27 Februari 2023	PPSDM Regional Bukittinggi	Klasikal		RM	-	
IX	Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar							
1	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 1 s.d 3	13 Maret s.d 17 Maret 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal		Contact Person: Juhen (0823 8784 4640) Putri (0818 0419 7796)	RM	-
2	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 4 s.d 6	25 April s.d 29 April 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal			RM	-
3	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 7 s.d 9	8 Mei s.d 12 Mei 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal			RM	-
4	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 10 s.d 12	22 Mei s.d 26 Mei 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal			RM	-
5	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 13 s.d 15	5 Juni s.d 9 Juni 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal			RM	-
6	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 16 s.d 18	19 Juni s.d 23 Juni 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal			RM	-
7	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 19 s.d 21	3 Juli s.d 7 Juli 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal			RM	-

**JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI SERTA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Penyelenggara	sumber Dana	Biaya/Orang
8	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 22 s.d 24	17 Juli s.d 22 Juli 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal		RM	-
9	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 25 s.d 27	7 Agustus s.d 11 Agustus	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal		RM	-
10	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024 Angkatan 28	21 Agustus s.d 25 Agustus 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal		RM	-
11	Diklat Dasar Satpol PP Alih Jabatan yang disesuaikan/Inpassing ke Jafung Angkatan 1 dan 2	14 Februari s.d 21 Februari 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal		RM	-
12	Diklat Pemadam Kebakaran (Angkatan I, II dan III) 6 Hari	6 s/d 11 Februari 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal		<i>Contact Person:</i> Reyhan (0877 8619 7935) Sapta (0878 8057 4382)	RM
13	Diklat Pemadam Kebakaran (Angkatan IV, V dan VI) 6 Hari	27 Februari s/d 4 Maret 2023	Balai PK Satpol PP dan Damkar Kemang Bogor	Klasikal	RM		-

INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
LINGKUP BPSDM KEMENDAGRI, PPSDM KEMENDAGRI REGIONA BANDUNG, MAKASSAR, YOGYAKARTA, DAN BUKITTINGGI
SERTA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATPOL PP DAN DAMKAR

No	Nama Pelatihan	Persyaratan Peserta	Materi Diklat	
I Pusat Standarisasi dan Sertifikasi				
1	Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan	PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/Kota dengan pangkat minimal Penata (III/c)	-	
2	Diklat pengelola LSP-PDN	Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi	-	
3	Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan Daerah Otonomi Baru	PNS di Lingkungan Pemprov, kabupaten/ Kota dengan pangkat minimal Penata (III/c)	-	
4	Afirmasi Asesor Kompetensi Pemerintahan	PNS dengan Jabatan pimpinan tinggi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	-	
5	Diklat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Bagi Daerah Otonomi Baru secara Virtual	Calon peserta meliputi PNS di lingkungan daerah otonomi baru khususnya Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan	-	
7	Diklat Hypermedia Lanjutan	Calon peserta meliputi PNS di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota dan yang telah mengikuti diklat hypermedia tahun 2022	-	
8	Diklat Augmented Reality (AR) dalam mendukung kompetensi ASN	Calon peserta meliputi PNS di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota	-	
II Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				
1	Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi penyelesaian konflik sosial dan penyelenggaraan pemilu, seperti Asisten Pemerintahan, Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas PMD, Kabag Pemerintahan, Kantor Kecamatan.	1	Kebijakan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			2	Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			3	Peran Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			4	Isu Strategis Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			5	Penanganan Konflik Sosial Pada Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
			6	Pemetaan Konflik Sosial dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Intelijen Pengamanan Daerah
			7	Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
			8	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Ham Pada Konflik Sosial
			9	Komunikasi Publik Dalam Menghadapi Konflik Sosial Penyelenggaraan Pemilu
			10	Peranan Literasi Digital Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan
			11	Overview Karakter Bangsa Indonesia
2	Diklat Manajemen Penanganan Konflik Sosial pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan	Kabid, Kasi, dan Staf Potensial pada Dinas PMD Provinsi, Kabupaten/Kota, Camat dan kepala Desa	1	Kebijakan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			2	Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			3	Peran Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			4	Isu Strategis Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			5	Penanganan Konflik Sosial Pada Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
			6	Pemetaan Konflik Sosial dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Intelijen Pengamanan Daerah
			7	Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

			8	Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM Pada Konflik Sosial
			9	Komunikasi Publik Dalam Menghadapi Konflik Sosial Penyelenggaraan Pemilu
			10	Peranan Literasi Digital Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan
			11	Overview Karakter Kebangsaan Indonesia
3	Diklat Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Daerah	ASN Dilingkungan Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			3	Kebijakan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
			4	Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada
			5	Penanganan Konflik Sosial pada Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
			6	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
			7	Antisipasi dan Pengelolaan Konflik Sosial bagi Aparatur Pemerintah
			8	Peran Kesbangpol dalam Menghadapi Potensi Ancaman Regional dan Global
			9	Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Rangka Perekat NKRI
			10	Komunikasi Sosial Politik dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak 2024 dan
			11	Overview Karakter Kebangsaan Indonesia
4	Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah	Sekretaris pada Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota.	1	Building Learning Commitment (BLC)
			2	Overview Karakter Kebangsaan Indonesia
			3	Optimalisasi Penggunaan Anggaran Daerah untuk Pengendalian Inflasi
			4	Overview Pengelolaan Barang Milik Daerah
			5	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			6	Overview Penyusunan dan Penentuan Target Kinerja berdasarkan Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk Ketercapaian LAKIP yang Sangat Baik
			7	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			8	Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS
			9	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital pada Pelayanan Publik
			10	Menjaga Integritas dan Menguatkan Netralitas ASN Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
			11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
			12	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5	Diklat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kabid, Kasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan	1	Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Strategi Peningkatan Cakupan Akta Pencatatan Sipil
			3	Pelaporan Kelahiran dan Kematian Kerja Sama Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan
			4	Teknis Pencatatan Kelahiran dan Kematian
			5	Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Rangka Penerbitan Isbat Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran (Pengesahan Anak)
			6	Pengaturan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Legalisir Dokumen Kependudukan yang digunakan di Luar Negeri
			7	Teknis Pencatatan Status Kewarganegaraan
			8	Teknis Perubahan Nama, Perubahan Peristiwa Penting lainnya, serta Pembetulan Akta dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
			9	Teknis Perubahan Nama, Perubahan Peristiwa Penting lainnya, serta Pembetulan Akta dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

			10	Teknis Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
			11	Kebijakan Layanan Prima Dukcapil
6	Diklat Penguatan Tugas-tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil
			2	Strategi Peningkatan Cakupan Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk
			3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			4	Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
			5	Inovasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			6	Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
			7	Kebijakan Layanan Prima Dukcapil
7	Diklat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Kabid, Kasi Bidang PIAK Sipil pada Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota	1	Kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Fasilitasi Administrasi Kependudukan
			3	Pengelolaan Database Informasi Administrasi Kependudukan
			4	Metode Pelayanan Publik
			5	Penyajian dan Pelayanan Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan
			6	Pentingnya Keamanan Informasi pada Informasi Administrasi Kependudukan
8	Diklat inovasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Rangka Pelayanan Publik	Kabid, Kasi Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik
			2	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Data Bagi Pengguna Daerah
			3	Simulasi Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama
			4	Implementasi Kebijakan dan Simulasi Pengiriman Data
			5	Simulasi Penyusunan Petunjuk Teknis
			6	Tata Kelola Penggunaan Card Reader dan Praktek
			7	Metode Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan implementasi Proof of Concept
			8	Implementasi Inovasi Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik
9	Seminar Mewujudkan Desa Cerdas Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	ASN Pada Kementerian Dalam Negeri dan Daerah yang terkait dengan Dinas PMD, Badan Kesbangpol, Kepala Desa dan perangkat Desa	1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penerapan Desa Cerdas menuju Pemilu dan Pilukada 2024
			2	Komunikasi Publik untuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
			3	Peran masyarakat desa dalam pengawasan kualitas partisipasi pemilih untuk pemilu serentak tahun 2024
			4	Strategi mewujudkan pemilu dan pilukada serentak tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas berdasarkan kualitas partisipasi pemilih di tingkat desa
10	Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik	ASN Pada Kementerian Dalam Negeri dan Daerah yang terkait dengan Dinas PMD, Badan Kesbangpol, Kepala Desa dan perangkat Desa	1	Building Learning Commitment (BLC)
			2	Overview Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
			3	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa
			4	Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa
			5	Prioritas Penggunaan Dana Desa
			6	Pengelolaan Aset Desa
			7	Aplikasi Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)
			8	Aplikasi SISKEUDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa)
			9	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
11	Diklat Manajemen Pemerintahan Desa	Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Dinas PMD Provinsi Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa	1	Overview Manajemen Pemerintahan Desa
			2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
			3	Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			4	Manajemen Penataan dan Kewenangan Desa
			5	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
			6	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
			7	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
			8	Inovasi Teknologi pada Pemerintahan Desa

			9	Prioritas Penggunaan Dana Desa dan
			10	Overview Karakter Kebangsaan Indonesia
12	Diklat pengelolaan Desa Cerdas	Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Dinas PMD Provinsi Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa	1	Pengelolaan Desa Cerdas (Smart Village)
			2	Penerapan Teknologi Digital Pada Inovasi Pelayanan Publik Pada Desa Cerdas
			3	Pemberdayaan Masyarakat Desa (community development)
			4	Pengelolaan Aset Desa Berbasis Elektronik
			5	Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik
			6	Penyediaan Layanan Potensi Desa
			7	Pengelolaan Desa Digital
			8	Komunikasi Publik Aparatur Pemerintah Desa Menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
			9	Prioritas Penggunaan Dana Desa dan
			10	Overview Karakter Kebangsaan Indonesia
13	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	- Pejabat Penatausahaan Keuangan - PPTK - Calon Bendahara - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Penerimaan - Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) - Bendahara Pengeluaran Pembantu - Bendahara Belanja Pegawai	1	Kerangka Umum Perbendaharaan Keuangan Daerah
			2	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan
			3	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran
			4	Penyelesaian Kerugian Daerah dan
			5	Kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial Pasca Penetapan Permendagri 77 Tahun 2020
14	Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	- Aparatur Bappeda - Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah yang menyusun dokumen terkait di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota	1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah (Renstra PD dan renja PD) beserta Perubahannya
			2	Teknis Penyusunan RPJMD
			3	Simulasi Penyusunan RPJMD dan
			4	Paparan Hasil Simulasi
15	Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	- Pejabat penatausahaan keuangan - bendahara dan pejabat penyusun laporan keuangan pada setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota	1	Konsep dan Siklus Akuntansi
			2	Akuntansi Pendapatan SKPD
			3	Akuntansi Beban dan Belanja
			4	Akuntansi Pembiayaan
			5	Akuntansi Aset Lancar
			6	Akuntansi Aset Tetap
			7	Akuntansi Aset Lainnya
			8	Akuntansi Kewajiban dan
			9	Laporan Keuangan SKPD
16	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aparatur yang menangani Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kerangka Umum Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
			2	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD
			3	Pengadaan BMD
			4	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD
			5	Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
			6	Pembukuan Barang Milik Daerah
			7	Inventarisasi Barang Milik Daerah dan
			8	Pelaporan Barang Milik Daerah
18	Diklat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Aparatur pada bidang perencanaan daerah yaitu Bendahara dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada	1	Gambaran Umum BLUD
			2	Rencana Strategis dan RBA dan
			3	Pengelolaan Keuangan BLUD
19	Diklat Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	aparatur yang menangani dan mengelola pajak dan retribusi daerah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota	1	Gambaran Umum Obyek dan Subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			2	Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			3	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
			4	Penagihan, Penyisihan Piutang dan Penghapusan Piutang Pajak
			5	Pembukuan Wajib Pajak
			6	Keberatan dan Banding
			7	Kadaluwarsa Penagihan
			8	Pemeriksaan Pajak Daerah dan
			9	Penyelidikan, Penyitaan, Penyanderaan dan Lelang
20	Bimtek Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	- Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Ahli Muda - Pelaksana/ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1	Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
			2	Pemahaman terhadap Jenis Penerima dan Mutu Layanan Dasar sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan
			3	Simulasi Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

21	Bimtek Tata Cara Pengisian Form Lampiran B Pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	- Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Ahli Muda - Pelaksana/ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1	Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
			2	Penjelasan Format Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
			3	Simulasi Pengisian Form Lampiran B pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22	Bimtek Penyusunan Rencana Aksi SPM	- Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Ahli Muda - Pelaksana/ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1	Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
			2	Penjelasan tentang rencana aksi penerapan SPM dan
			3	Simulasi Penyusunan Rencana Aksi sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
23	Bimtek Penerapan SPM dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	- Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Ahli Muda - Pelaksana/ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1	Arah kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021
			2	Integrasi SPM kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
			3	Penyusunan Kebijakan Perencanaan SPM dan
			4	Perencanaan dan penganggaran SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 dan Pengenalan terhadap Nomenklatur dan kode Rekening penganggaran SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Tata Cara Pengisian Perencanaan sesuai dengan Lampiran B
24	Workshop Penerapan Standar Pelayanan Minimal (online/daring)	- Pejabat Administrator/ Pejabat Fungsional Ahli Madya - Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional Ahli Muda - Pelaksana/ Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1	Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM
			2	Integrasi Standar Pelayanan Minimal Kedalam Dokumen Perencanaan
			3	Tata cara Penyusunan Pelaporan Penerapan SPM Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM
			4	Tata cara Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM
			5	Tata Cara Pelaporan Penerapan SPM kedalam Aplikasi Pelaporan Berbasis <i>Web</i>
25	Diklat bagi Staf Ahli Kepala Daerah	para Staf Ahli Kepala Daerah Lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota	1	Pengarahan Program
			2	Sistem Pemerintahan Indonesia
			3	7 Core Kompetensi Pemerintahan
			4	Melakukan Diplomasi Organisasi
			5	Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan
			6	Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
			7	Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama
			8	Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
			9	Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat
			10	Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan
			11	Telaahan Isu-Isu Strategis
			12	Penyusunan Telaahan Isu-Isu Strategis
			13	Lanjutan Penyusunan Telaahan Isu-Isu Strategis
			14	Permendagri No 134 Tahun 2018
			15	Penjelasan Tata Cara Penyusunan Telaahan Isu-Isu Strategis
			16	Simulasi Penyusunan Telaahan Isu-Isu Strategis
III	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan			
1	Diklat Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	ASN pada Kementerian Dalam Negeri pada bagian perencanaan	1	Kebijakan Pengembangan SDM di lingkungan Kemendagri dan Pemda
			2	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC) & Revolusi Mental
			3	Peranan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Organisasi
			4	Kebijakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PERMENPAN No 53 Tahun 2014
			5	Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja
			6	Hubungan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LAPKIN) dengan Dokumen Perencanaan
			7	Pengendalian dalam Mewujudkan Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
			8	Penyusunan Indikator Kinerja dan Penyusunan Rencana Kinerja/Kerja

			9	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator pada Perjanjian Kinerja
			10	Reviu Laporan Kinerja
			11	Praktek Penyusunan Laporan Kinerja
			12	Optimalisasi Kinerja SDM Aparatur
2	Webinar Inovasi Daerah	1. ASN dilingkungan Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan aparat desa 2. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Bappeda/Bappelitbang	Inovasi Desa : Strategi Pengembangan Inovasi Pererintahan Desa	
3	Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah (Blended)	1. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Bappeda/Bappelitbang 2. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait bidang inovasi	1	Kebijakan Pengembangan SDM di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
			2	Building Learning Commitment (BLC) dan Revolusi Mental
			3	Kebijakan Inovasi Daerah
			4	Best Practice
			5	Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
			6	Indeks Inovasi Daerah
			7	Inisiatif dan Rancangan Inovasi Daerah
			8	Mekanisme dan Tata Kelola Inovasi Daerah
			9	Penyusunan Rancangan Proposal Inovasi Daerah
			10	Optimalisasi Kinerja SDM Aparatur
4	Diklat Analisis Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	1. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Biro Organisasi dan tata laksana 2. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi/mengelola Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1	Kebijakan Pengembangan SDM di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
			2	Kebijakan Umum Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemda
			3	Building Learning Commitment (BLC) dan Revolusi Mental
			4	Implementasi Analisis Jabatan dan Penyusunan Analisis jabatan berdasarkan Permenpan No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
			5	Penyusunan Syarat Jabatan, Norma dan Penyusunan Uraian Tugas
			6	Analisis Beban Kerja
			7	Evaluasi Jabatan
			8	Optimalisasi SDM Aparatur
			9	ANJAB, ABK, TPP melalui Aplikasi simonakemendagrigo
5	Diklat Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	1. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan 2. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi/mengelola Tata Naskah Dinas 3. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah pada bagian Tata Usaha	1	Kebijakan Pengembangan SDM di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
			2	Optimalisasi Kinerja SDM Aparatur
			3	Building Learning Commitment (BLC) dan Revolusi Mental
			4	Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemda
			5	Penyelenggaraan Teknis Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemda, Bentuk dan Susunan Naskah Dinas
			6	Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas
			7	Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah
			8	Tata Naskah Dinas Elektronik
			9	Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas, MC dan Pidato
6	Diklat Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023	1. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah 2. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi/mengelola Manajemen Kepegawaian	1	Kebijakan Pengembangan SDM di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
			2	Optimalisasi Kinerja SDM Aparatur
			3	Building Learning Commitment (BLC) dan Revolusi Mental
			4	Kebijakan Manajemen ASN Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 dan PP Tahun 2017
			5	Manajemen Pengadaan, Penyusunan dan Penetapan ASN
			6	Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan Fungsional
			7	Pembinaan Disiplin dan Tindakan Administrasi PNS

			8	Pola dan Pengembangan Karier serta Isu-Isu Aktual Bidang Kepegawaian
			9	Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban ASN
IV	PPSDM Kemendagri Regional Bandung			
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Telah menduduki dalam a) jabatan administrator, b) JF jenjang ahli madya, c) jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, d) JF yang setingkat jabatan pengawas, paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau e) jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS dan paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 2). telah mengikuti dan lulus PKP, kecuali bagi Peserta yang a) telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a), huruf b), huruf d), atau huruf e); dan/atau b) menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c) dan baru pertama kali mengikuti		
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Telah menduduki dalam 1) jabatan pengawas 2) paling rendah JF yang setingkat jabatan pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau 3) jabatan pelaksana paling rendah dengan pangkat penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan		
9	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Pengawas di Daerah Lingkup Regional	A. Persyaratan Calon Peserta: 1. Para ASN Pemda yang membidangi urusan pelayanan dasar. 2. Pejabat Pengawas/Setara Fungsional Muda dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan B. Peserta wajib membawa: 1. Surat Perintah dari Instansi Pengirim. 2. Laptop. 3. Pas foto latar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 buah.		
10	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Administrator di Daerah Lingkup Regional	A. Persyaratan Calon Peserta: 1. Para ASN Pemda yang membidangi urusan pelayanan dasar. 2. Pejabat Administrator/Setara Fungsional Madya dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan B. Peserta wajib membawa: 1. Surat Perintah dari Instansi Pengirim. 2. Laptop. 3. Pas foto latar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 buah.		

11	Diklat Teknis SPM Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah Lingkup Regional	<p>A. Persyaratan Calon Peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para ASN Pemda yang membidangi urusan pelayanan dasar. 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala OPD dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan <p>B. Peserta wajib mengupload:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah dari Instansi Pengirim. 2. Pas foto latar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 buah. 	
14	Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional PPUPD yang berasal dari PPUPD Jenjang Ahli Pertama 2. Pangkat dan Gol. paling rendah Penata Muda Tk. I (III/ b) 3. Angka Kredit kumulatif minimal 75% dari syarat kenaikan Pangkat 4. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB.) 5. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda (khusus bagi Pejabat Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda, namun belum mengikuti Pelatihan Jenjang Ahli Muda) 	
15	Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional PPUPD yang berasal dari Pengangkatan Pertama 2. Surat Keputusan CPNS dan/ atau Surat Keputusan PNS sebagai PPUPD 3. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB.) 	
17	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD 2. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang 3. Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural sesuai standar kompetensi 	
18	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD 2. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang 3. Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural sesuai standar kompetensi 	
19	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional PPUPD yang berasal dari PPUPD Jenjang Ahli Pertama yang akan naik ke Jenjang Ahli Muda 2. Pangkat dan Gol. paling rendah Penata Muda Tk. I (III/ b) 3. Angka Kredit kumulatif minimal 75% dari syarat kenaikan Pangkat 4. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB.) 5. Sertifikat Kelulusan Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Muda 	
20	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Barang Milik Daerah/ Pejabat Struktural/ Fungsional atau Jabatan Pelaksana terkait lainnya yang bekerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah atau bidang lainnya sesuai kebutuhan 2. Pengurus/ Penyimpan/ Penilai Barang Milik Daerah 	
21	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Struktural, Fungsional, Bendahara atau Jabatan Pelaksana terkait lainnya yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan Daerah atau bidang lainnya sesuai kebutuhan	
22	Diklat Substantif Peningkatan Kapasitas Lurah	Lurah atau Aparatur Kelurahan Lainnya serta ASN Lainnya sesuai kebutuhan	
23	Diklat Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PPUPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional PPUPD 2. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PPUPD yang berasal dari unsur teknis kepegawaian atau pengembangan SDM 3. Pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja/ kinerja PPUPD dan ASN lainnya yang berkepentingan 4. ASN lainnya yang berkepentingan 	

24	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Pejabat Fungsional atau ASN lainnya sesuai kebutuhan yang bekerja di lingkungan K/L maupun Pemerintah Daerah																																															
25	Latsar CPNS Golongan III dan II	1. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS 2. Pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta 3. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; 4. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS																																															
V PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta																																																	
1	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur	ASN yang merupakan pejabat fungsional analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Analis SDM Aparatur	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Orientasi Pelatihan & <i>Building Learning Commitment</i></td></tr> <tr><td>2</td><td><i>Pre Test</i></td></tr> <tr><td>3</td><td>Overview Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional SDM Aparatur</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kebijakan Manajemen ASN</td></tr> <tr><td>6</td><td>Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</td></tr> <tr><td>7</td><td>Perencanaan dan Pengadaan Pegawai</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai</td></tr> <tr><td>9</td><td>Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 1 dan 2</td></tr> <tr><td>10</td><td>Manajemen kinerja pegawai</td></tr> <tr><td>11</td><td>Kompensasi, Jaminan dan Perlindungan Pegawai</td></tr> <tr><td>12</td><td>Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kenaikan Pangkat dan Mutasi</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sistem Informasi Kepegawaian</td></tr> <tr><td>15</td><td>Penyusunan Kebutuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian JF Analis SDMA</td></tr> <tr><td>16</td><td>Pengembangan Profesi dan Penyusunan KTI Inovatif JF Analis SDMA</td></tr> <tr><td>17</td><td>Pemahaman Pelaksanaan tugas JF Analis SDMA</td></tr> <tr><td>18</td><td>Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 3 dan 4</td></tr> <tr><td>19</td><td>Pengelolaan Kinerja dan Angka Kredit JF Analis SDMA</td></tr> <tr><td>20</td><td>Simulasi Penyusunan Angka Kredit</td></tr> <tr><td>21</td><td>Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pelatihan</td></tr> <tr><td>22</td><td><i>Post Test</i></td></tr> <tr><td>23</td><td>Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 5 dan 6</td></tr> </table>	1	Orientasi Pelatihan & <i>Building Learning Commitment</i>	2	<i>Pre Test</i>	3	Overview Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional SDM Aparatur	4	Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	5	Kebijakan Manajemen ASN	6	Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	7	Perencanaan dan Pengadaan Pegawai	8	Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai	9	Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 1 dan 2	10	Manajemen kinerja pegawai	11	Kompensasi, Jaminan dan Perlindungan Pegawai	12	Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai	13	Kenaikan Pangkat dan Mutasi	14	Sistem Informasi Kepegawaian	15	Penyusunan Kebutuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian JF Analis SDMA	16	Pengembangan Profesi dan Penyusunan KTI Inovatif JF Analis SDMA	17	Pemahaman Pelaksanaan tugas JF Analis SDMA	18	Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 3 dan 4	19	Pengelolaan Kinerja dan Angka Kredit JF Analis SDMA	20	Simulasi Penyusunan Angka Kredit	21	Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pelatihan	22	<i>Post Test</i>	23	Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 5 dan 6
1	Orientasi Pelatihan & <i>Building Learning Commitment</i>																																																
2	<i>Pre Test</i>																																																
3	Overview Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional SDM Aparatur																																																
4	Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN																																																
5	Kebijakan Manajemen ASN																																																
6	Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian																																																
7	Perencanaan dan Pengadaan Pegawai																																																
8	Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai																																																
9	Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 1 dan 2																																																
10	Manajemen kinerja pegawai																																																
11	Kompensasi, Jaminan dan Perlindungan Pegawai																																																
12	Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai																																																
13	Kenaikan Pangkat dan Mutasi																																																
14	Sistem Informasi Kepegawaian																																																
15	Penyusunan Kebutuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian JF Analis SDMA																																																
16	Pengembangan Profesi dan Penyusunan KTI Inovatif JF Analis SDMA																																																
17	Pemahaman Pelaksanaan tugas JF Analis SDMA																																																
18	Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 3 dan 4																																																
19	Pengelolaan Kinerja dan Angka Kredit JF Analis SDMA																																																
20	Simulasi Penyusunan Angka Kredit																																																
21	Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pelatihan																																																
22	<i>Post Test</i>																																																
23	Pembuatan Ikhtisar Materi Pelatihan Hari ke 5 dan 6																																																
2	Pelatihan Teknis Manajemen Kinerja Pegawai Berdasarkan PermenPAN Nomor 6 dan 7 Tahun 2022	ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Analisis Kebijakan ASN</td></tr> <tr><td>2</td><td>Arah Kebijakan Manajemen ASN</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan utk Penyederhanaan Birokrasi (PermenPAN No. 7 Tahun 2022)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kebijakan Manajemen Kinerja (PermenPAN No. 6 Tahun 2022)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Praktik Penyusunan Matrik Peran dan Hasil</td></tr> <tr><td>6</td><td>Praktik Penyusunan Perencanaan Kinerja</td></tr> <tr><td>7</td><td>Evaluasi Kinerja Pegawai</td></tr> <tr><td>8</td><td>Review Penyelenggaraan</td></tr> </table>	1	Analisis Kebijakan ASN	2	Arah Kebijakan Manajemen ASN	3	Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan utk Penyederhanaan Birokrasi (PermenPAN No. 7 Tahun 2022)	4	Kebijakan Manajemen Kinerja (PermenPAN No. 6 Tahun 2022)	5	Praktik Penyusunan Matrik Peran dan Hasil	6	Praktik Penyusunan Perencanaan Kinerja	7	Evaluasi Kinerja Pegawai	8	Review Penyelenggaraan																														
1	Analisis Kebijakan ASN																																																
2	Arah Kebijakan Manajemen ASN																																																
3	Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan utk Penyederhanaan Birokrasi (PermenPAN No. 7 Tahun 2022)																																																
4	Kebijakan Manajemen Kinerja (PermenPAN No. 6 Tahun 2022)																																																
5	Praktik Penyusunan Matrik Peran dan Hasil																																																
6	Praktik Penyusunan Perencanaan Kinerja																																																
7	Evaluasi Kinerja Pegawai																																																
8	Review Penyelenggaraan																																																
3	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Muda (dari Inpassing)	ASN yang menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda	<table border="1"> <tr><td>1</td><td><i>Overview</i></td></tr> <tr><td>2</td><td><i>Pre Test</i></td></tr> <tr><td>3</td><td>Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Integritas)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Moral)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Kejujuran)</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Motivasi)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Nasionalisme dan Kebangsaan)</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Karakter Kepribadian)</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemda</td></tr> <tr><td>10</td><td>Dinamika Kelompok</td></tr> <tr><td>11</td><td>Filosofi PPUPD</td></tr> <tr><td>12</td><td>Norma dan Kode Etik Jabatan Fungsional PPUPD</td></tr> <tr><td>13</td><td>Esensi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</td></tr> <tr><td>14</td><td>Komunikasi Pengawasan</td></tr> <tr><td>15</td><td>Teknik Pengawasan PPUPD</td></tr> <tr><td>16</td><td>Pengawasan Penerapan SPM</td></tr> <tr><td>17</td><td>Pengawasan Terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah</td></tr> <tr><td>18</td><td><i>Posttest</i></td></tr> <tr><td>19</td><td><i>Review</i></td></tr> </table>	1	<i>Overview</i>	2	<i>Pre Test</i>	3	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Integritas)	4	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Moral)	5	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Kejujuran)	6	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Motivasi)	7	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Nasionalisme dan Kebangsaan)	8	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Karakter Kepribadian)	9	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	10	Dinamika Kelompok	11	Filosofi PPUPD	12	Norma dan Kode Etik Jabatan Fungsional PPUPD	13	Esensi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	14	Komunikasi Pengawasan	15	Teknik Pengawasan PPUPD	16	Pengawasan Penerapan SPM	17	Pengawasan Terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	18	<i>Posttest</i>	19	<i>Review</i>								
1	<i>Overview</i>																																																
2	<i>Pre Test</i>																																																
3	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Integritas)																																																
4	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Moral)																																																
5	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Kejujuran)																																																
6	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Motivasi)																																																
7	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Nasionalisme dan Kebangsaan)																																																
8	Pengembangan Sikap dan Prilaku PPUPD (Karakter Kepribadian)																																																
9	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemda																																																
10	Dinamika Kelompok																																																
11	Filosofi PPUPD																																																
12	Norma dan Kode Etik Jabatan Fungsional PPUPD																																																
13	Esensi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah																																																
14	Komunikasi Pengawasan																																																
15	Teknik Pengawasan PPUPD																																																
16	Pengawasan Penerapan SPM																																																
17	Pengawasan Terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah																																																
18	<i>Posttest</i>																																																
19	<i>Review</i>																																																

4	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional PPUPD	ASN yang menduduki Jabatan Fungsional PPUPD	1	Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri
			2	Kebijakan Sertifikasi Jabatan Fungsional
			3	Kebijakan Umum Permenpan 36 Tahun 2020
			4	Pembinaan Kepegawaian dan Jenjang Karir Jabatan Fungsional
			5	Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit
			6	Teknis Penyusunan DUPAK
			7	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD
			8	Simulasi Penilaian dan Penetapan
			9	Kebijakan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD
5	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Pertama (dari Inpassing)	ASN yang menduduki Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama	1	Kebijakan Standarisasi
			2	Integritas Level 2
			3	Moral Level 2
			4	Kejujuran Level 2
			5	Motivasi Level 2
			6	Nasionalisme dan Kebangsaan Level 2
			7	Karakter Kepribadian Level 2
			8	Filosofi Pengawas PPUPD
			9	Norma dan Kode Etik Jabfung PPUPD
			10	Esensi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
			11	Komunikasi Pengawasan Level 1
			12	Teknik Pengawasan PPUPD
			13	Pengawasan Penerapan SPM Level 1
			14	Pengawasan Terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
			15	<i>Pre Test</i>
			16	<i>Post Test</i>
			17	Dinamika Kelompok
6	Pelatihan Penyusunan Kebijakan Analisis Kebijakan	Para Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	1	<i>Overview</i>
			2	<i>Review</i>
			3	<i>Pre Test</i>
			4	<i>Post Test</i>
			5	Gambaran Umum JF Analisis Kebijakan
			6	Mekanisme Kerja analisis Kebijakan
			7	Butir- butir Kegiatan Analisis Kebijakan
			8	Penyusunan dan Penghitungan DUPAK
			9	Dokumen Saran Kebijakan
			10	Praktek Penyusunan Dokumen Kebijakan
7	Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan SPM (RM)	Pengawas/Pelaksana/Staff yang melaksanakan menangani SPM lingkungan Pemerintah Daerah Kecamatan.	1	Konsep Dasar SPM
			2	Kebijakan Penerapan SPM sesuai dengan Bidang Urusan wajib Pelayanan Dasar
			3	Penyusunan dan Penetapan SPM
			4	Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi serta Pelaporan Penerapan SPM
			5	Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
			6	Perencanaan Penganggaran SPM
			7	Praktek Penyusunan Rencana Capaian SPM
			8	Seminar (Ekspose Kelompok) / Pemaparan Hasil Simulasi Kelompok
			9	Pengintegrasian SPM dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan
			10	Ceramah Kebijakan Pengembangan ASN
			11	Overview Program Diklat
			12	Review Pelaksanaan Diklat
8	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan II	KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 13/K.1/PDP.07/2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Persyaratan Peserta Latsar CPNS Gol III dan II yaitu telah lulus seleksi administrasi dan telah mendapatkan keputusan pengangkatannya sebagai CPNS		KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 14/K.1/PDP.07/2022 TENTANG KURIKULUM PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL :
			a.	Pembelajaran Mandiri <i>Massive Open Online Course (MOOC)</i>
			b.	Distance Learning A. Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara 2. Analisis Isu Kontemporer 3. Kesiapsiagaan Bela Negara B. Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar ASN 1. Berorientasi Pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal 6. Adaptif 7. Kolaboratif

			<p>C. Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>1. Manajemen ASN 2. Smart ASN 3.Coaching Pembelajaran Agenda 1, 2, dan 3</p> <p>D. Agenda 4 : Habituaasi 1. Merancang Aktualisasi 2. pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi 3. Evaluasi Rancangan Aktualisasi Pembekalan Habituaasi</p> <p>E. Evaluasi Akademik</p>
			<p>c. Aktualisasi</p> <p>Klasikal</p> <p>C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Dinamika Kelompok Pembinaan Sikap Perilaku C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) C: Core Values dan Employer Branding ASN Pembelajaran Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS Pembelajaran Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara</p> <p>d.</p> <p>C : Profesionalisme ASN Pembelajaran Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi Evaluasi Seminar Aktualisasi Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan</p>
9	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	<p>Sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 375/K.1/PDP.07/2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN</p> <p>Persyaratan Peserta PKP : telah menduduki dalam:</p> <p>1) jabatan pengawas; 2) paling rendah JF yang setingkat jabatan pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau -20- 3) jabatan pelaksana paling rendah dengan pangkat penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.</p>	<p>a. Pembelajaran Mandiri</p> <p>1 Kebijakan <i>Blended Learning</i></p> <p>2 Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara</p> <p>3 Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara</p> <p>4 Pembelajaran dan Penilaian Sikap Perilaku Mata Pelatihan Dasar: Self Resilience dan GEDSI</p> <p>5 Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>6 Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>7 Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan</p> <p>8 Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda III: Pengendalian Pekerjaan</p> <p>9 Pembelajaran dan Penilaian Sikap Perilaku Mata Pelatihan Dasar: Digital Skill dalam Pembuatan Kebijakan</p> <p>10 Pembelajaran Agenda IV: Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>11 Pembelajaran Mata Pelatihan Pilihan Penunjang Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>12 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi Diri</p> <p>b. E-Learning</p> <p>1 Overview Kebijakan Pelatihan & Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku</p> <p>2 Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri</p> <p>3 Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara</p> <p>4 Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>5 Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan</p> <p>6 Pembelajaran Agenda IV: Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>c. Pembangunan Komitmen Bersama</p> <p>d. Pembelajaran Klasikal Tahap I</p> <p>1 Pembukaan</p> <p>2 Ceramah Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik</p> <p>3 Ceramah Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila</p> <p>4 Overview Kebijakan Pelatihan & Pengecekan Pemetaan Sikap Perilaku dan Strategi <i>Pengembangan Potensi Diri</i></p> <p>5 Dinamika Kelompok</p>

			6	Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara
			7	Ceramah Berpikir Kreatif dalam Pelayanan
			8	Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan
			9	Ceramah Manajemen Mutu
			10	Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan
			11	Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik
			12	Studi Lapangan Pelayanan Publik
			13	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik
			14	Ceramah Studi Lapangan Pelayanan Publik
			15	Evaluasi Akademik
			16	Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
			17	Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
			18	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
			19	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
			20	Sosiometri
			e. Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan	
			f. Pembelajaran Klasikal Tahap II	
			1	Pembimbingan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
			2	Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik
			3	Ceramah Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan
			4	Penutupan
10	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pejabat yang bertugas dalam pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.	1	Ceramah Arah Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur
			2	Ceramah Materi Muatan Teknis Substansi
			3	Kerangka Umum Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
			4	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD
			5	Pengadaan BMD
			6	Penggunaan BMD
			7	Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
			8	Pemanfaatan BMD
			9	Pembukuan BMD
			10	Inventarisasi Barang Milik Daerah
			11	Pelaporan Barang Milik Daerah
			12	Pemindahtanganan BMD
			13	Penilaian BMD
			14	Pemusnahan BMD
			15	Penghapusan BMD
			16	Penyelesaian Kerugian Daerah
11	Bimtek Peningkatan Kompetensi Aparatur Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Aparatur Kecamatan yang bertugas dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1	Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasar UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa
			2	Wawasan Kebangsaan
			3	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Desa
			4	Pengelolaan Keuangan, Aset Desa dan PBJ Desa
			5	Penyusunan Produk Hukum Desa
			6	Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
			7	Inovasi Pengelolaan BUMDesa
			8	Rencana Aksi Tata Kelola Pemdesa dan Inovasi BUMDesa
			9	<i>Building Learning Commitment</i>
12	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 375/K.1/PDP.07/2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN Persyaratan Peserta PKA : 1) telah menduduki dalam: a) jabatan administrator; b) JF jenjang ahli madya; c) jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; d) JF yang setingkat jabatan pengawas, paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c	a. Pembelajaran Mandiri	
			1	Kebijakan <i>Blended Learning</i>
			2	Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme
			3	Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda I
			4	Pembelajaran dan Penilaian Sikap Perilaku Mata Pelatihan Dasar: Self Resilience dan Berpikir Kritis
			5	Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Kinerja
			6	Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda II
			7	Pembelajaran Agenda III: Manajemen Kinerja
			8	Pembuatan Esai Isu-Isu Agenda III
			9	Pembelajaran dan Penilaian Sikap Perilaku Mata Pelatihan Dasar: Digital Skill dalam Pembuatan Kebijakan
			10	Pembelajaran Agenda IV: Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja Organisasi
			11	Pembelajaran Mata Pelatihan Pilihan Penunjang Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja Organisasi
			12	Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi Diri
			b. E-Learning	

		dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau e) jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS dan paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; 2) telah mengikuti dan lulus PKP, kecuali bagi Peserta yang: a) telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a), huruf b), huruf d), atau huruf e); dan/atau b) menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c) dan baru pertama kali mengikuti Pelatihan Struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1 Overview Kebijakan Pelatihan & Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku <i>Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri</i> 2 Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara 3 Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan 4 Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan 5 Pembelajaran Agenda IV: Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan <p>c. Pembangunan Komitmen Bersama</p> <p>d. Pembelajaran Klasikal Tahap I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembukaan 2 Ceramah Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik 3 Ceramah Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila 4 Overview Kebijakan Pelatihan & Pengecekan Pemetaan Sikap Perilaku dan Strategi <i>Pengembangan Potensi Diri</i> 5 Dinamika Kelompok 6 Pembelajaran Agenda I: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara 7 Ceramah Berpikir Kreatif dalam Pelayanan 8 Pembelajaran Agenda II: Kepemimpinan Pelayanan 9 Ceramah Manajemen Mutu 10 Pembelajaran Agenda III: Pengendalian Pekerjaan 11 Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik 12 Studi Lapangan Pelayanan Publik 13 Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik 14 Ceramah Studi Lapangan Pelayanan Publik 15 Evaluasi Akademik 16 Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik 17 Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik 18 Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik 19 Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik 20 Sosiometri <p>e. Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan</p> <p>f. Pembelajaran Klasikal Tahap II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembimbingan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik 2 Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik 3 Ceramah Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan 4 Penutupan
13	Orientasi RPJMD dan Evaluasi Renstra Organisasi Perangkat Daerah	JPT Pratama dan /atau Sekretaris dinas / lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) beserta Perubahannya 2 Teknis Penyusunan Renstra - PD 3 BENCHMARKING
14	Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2 Pengantar Intelijen 3 Kewaspadaan Dini di Daerah Bagi Lurah dan Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 4 Nasionalisme 5 Kebijakan Strategis Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan 6 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 7 Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Lurah 8 Teknik Verifikasi dan Validasi Data serta Informasi 9 Praktek Terpadu (Gladi Manajemen Pemerintahan) 10 Uji Sertifikasi Kompetensi (Tertulis dan Portofolio) 11 Pelaporan
VI	PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi		
1	TOT Pengembangan Kompetensi Substansi Kemendagri (Hybrid Method)	PNS Kemendagri	
2	Pelatihan Teknis SAKIP	Pengelola laporan kegiatan di OPD	
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pejabat eselon III	
4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Pejabat eselon IV	
5	Latsar Bagasi CPNS	CPNS	

6	Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara OPD	Bendahara OPD	
7	Pelatihan Teknis Pengelolaan Tata Naskah Dinas OPD	pegawai pengelola administrasi persuratan	
8	Pelatihan Teknis Standar Pelayanan Publik	Pegawai di dinas pelayanan atau kantor camat	
9	Diklat SPM	Perencana	
VII	Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar		
1	Peningkatan Satpol PP dalam Rangka Mendukung Pemilu 2024	PNS yang telah bertugas dan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja, Kondisi Fisik Sehat Jasmani dan Rohani	
2	Diklat Dasar Satpol PP Alih Jabatan yang disesuaikan/Inpassing ke Jafung Angkatan 1 dan 2	PNS yang telah bertugas dan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja, Kondisi Fisik Sehat Jasmani dan Rohani	
3	Diklat Pemadam Kebakaran (Angkatan I, II dan III) 6 Hari	Wajib PNS, Kondisi Fisik Sehat Jasmani dan Rohani	
4	Diklat Pemadam Kebakaran (Angkatan IV, V dan VI) 6 Hari	Kondisi Fisik Sehat Jasmani dan Rohani	